

**PRODUKTIVITAS PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN
KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Program Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

FITRI SETIYANTI

NIM. 9651007

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

INTISARI

Judul dari penelitian ini adalah “PRODUKTIVITAS PEGAWAI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH” dengan perumusan masalah yang diajukan adalah (1) Bagaimana kondisi pegawai dalam mendukung tingkat produktivitas kerja d kantor Pertanahan Kota Salatiga (2) Bagaimana produktivitas pegawai tiap seksi sesuai tugas pokok dan fungsi kantor Pertanahan Kota Salatiga; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pegawai dalam mendukung produktivitas kerja dan mengetahui produktivitas pegawai tiap seksi dari tahun anggaran 1997 / 1998 sampai dengan 1999 / 2000.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Dari data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan kuesioner yang berupa data kualitatif ataupun data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif presentase.

Hasil penelitian yang dicapai dapat disimpulkan Kondisi pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga sudah mendukung produktivitas kerja dan produktivitas pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga selama 3 tahun anggaran yaitu Sub Bagian Tata Usaha sebesar 102,76 % (Baik), Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah sebesar 100 % (baik), Seksi Penatagunaan Tanah sebesar 98,69 % (baik), Seksi Hak-Hak Atas Tanah sebesar 86,09% (baik), dan Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah sebesar 98,69 % (baik). Dari tanggapan responden Kantor Pertanahan Kota Salatiga mempunyai pegawai dengan tingkat disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, sedangkan sarana dan prasarana di Kantor Pertanahan Kota Salatiga cukup memadai.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Persembahan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Intisari	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	17

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	22
B. Daerah Penelitian	22
C. Populasi dan Obyek Penelitian	23
D. Jenis Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data	24
F. Analisis Data.....	24

BAB IV. GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA

A. Gambaran Keadaan Kantor Pertanahan Kota Salatiga....	26
B. Organisasi dan Tata Kerja	26
C. Bagan Organisasi	27
D. Sumber Daya Manusia	28
E. Sarana dan Prasarana	30

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga	33
1. Jumlah dan Persebaran Pegawai	33
2. Pendidikan	36
3. Golongan	38
4. Jabatan / Eselon	39

B. Produktivitas Pegawai Pada Kantor Pertanahan	
Kota Salatiga.....	41
1. Sub Bagian Tata Usaha	41
2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah	45
3. Seksi Penatagunaan Tanah	48
4. Seksi Hak-Hak Tanah	51
5. Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.....	54
C. Tanggapan Responden.....	57

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar dan pedoman. Sasaran pembangunan nasional adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Sasaran pada GBHN Tap. MPR No. II/MPR/1998 dalam sektor 19 tentang bidang pertanahan antara lain adalah mewujudkan kelembagaan pertanahan yang berkualitas dan berkemampuan tinggi pengembangan sistem informasi pertanahan yang transparan dan penyempurnaan sistem pelayanan pertanahan.

Pembangunan nasional di bidang pertanahan di masa depan akan menghadapi permasalahan yang semakin berat, karena terjadi dinamika pembangunan yang sangat cepat. Hal ini disebabkan karena terjadi pembangunan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Dimasa mendatang pendidikan masyarakat yang semakin meningkat secara otomatis juga akan meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada akhirnya meningkat pula tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan di bidang pertanahan yang efisien, sederhana dan murah.

lembaga peradilan terhadap keputusan-keputusan Badan Pertanahan Nasional dalam menunaikan tugasnya menjabarkan ketentuan dan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk itu Badan Pertanahan nasional harus dapat meningkatkan produktifitasnya sebagai pengemban tugas pengelola administrasi pertanahan.

Di tengah-tengah semakin meningkatnya tantangan secara nasional dan derasnya pengaruh lingkungan global diharapkan Kantor Pertanahan Nasional tetap mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan nasional. Oleh karena besar kecilnya kontribusi bagi pembangunan nasional menentukan kokoh tidaknya eksistensinya Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang dibebani tugas koordinasi pembangunan pertanahan dan mengelola manajemen pertanahan, maka pendekatan manajemen modern yang menjadikan sumber daya manusia sebagai kunci pokok diperlukan. Pengembangan sumber daya manusia agar terus meningkatkan produktifitas dalam menjalankan kewajiban sebagai pengelola manajemen pertanahan harus tetap dilakukan.

Penciptaan sumber daya manusia pertanahan yang handal berarti memberikan sumbangan bagi Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pengembangan Undang-Undang Pokok Agraria dalam mewujudkan misi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan : "Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan pemimpin penggunaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara bergotong royong.

Catur Tertib Pertanahan merupakan sasaran dari pembangunan pertanahan. Diharapkan pelaksanaan pembangunan pertanahan yang berdasarkan UUPA dibutuhkan kualitas sumber daya manusia yang berfikir terpadu dan dapat melaksanakan tugas seluruh aspek pertanahan secara utuh, sehingga catur tertib pertanahan dapat diwujudkan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988 ditetapkan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota. Adapun Badan Pertanahan Nasional Pusat

Sehubungan dengan tugas pelayanan diperlukan pengelolaan pertanahan khususnya dalam pelayanan pembangunan dan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan seperti yang tertera dalam Keputusan Presiden nomor 26 tahun 1988. Dalam hal ini perlu didukung dengan tersedianya aparat pelaksana yang mampu dan trampil dalam arti profesional dan berkualitas, berdisiplin dan berdedikasi tinggi.

Mengingat bahwa kebutuhan manusia akan terus meningkat ditunjang dengan adanya pembangunan di segala sektor kehidupan masyarakat, sedangkan luas tanah yang tersedia bersifat tetap sehingga nilai ekonomis tanah jelas semakin tinggi, muncul masalah pertanahan yang semakin kompleks. Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan yang semakin meningkat maka Badan Pertanahan Nasional harus berupaya memberikan pelayanan yang baik, cepat, lancar dan tepat waktu. Dengan alasan tersebut Badan Pertanahan Nasional memerlukan dukungan sumber daya manusia yang handal serta trampil baik di bidang teknologi maupun ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan produktivitas organisasi yang semakin efisien dan efektif.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagai unsur pelaksana yang langsung melayani masyarakat diharapkan mampu mewujudkan administrasi pertanahan sesuai Keputusan Presiden nomor 7 tahun 1979 sebagai landasan operasional Badan Pertanahan Nasional. Keppres tersebut mengamankan

penggunaan tanah sehingga akan tercipta suasana yang menjamin terlaksananya pembangunan baik yang ditangani pemerintah maupun swasta.

Kebijakan dasar di bidang pertanahan tercermin dalam Catur Tertib Pertanahan yang mencakup :

1. Tertib Hukum Pertanahan
2. Tertib Administrasi Pertanahan
3. Tertib Penggunaan Tanah
4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Silalahi (1997:4) mengatakan bahwa :

“Berdasarkan sejarah perkembangan dari lembaga pertanahan maka dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1988 telah tersebut sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) buah sertifikat dalam jangka waktu 28 tahun. Hal ini berarti dalam setiap tahun produksi sertifikat hanya berjumlah 357.143 buah rata-rata per bulan adalah 29.762 buah. Sedangkan dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1997 telah terbit 8.000.000 (delapan juta) buah sertifikat dalam jangka waktu 9 tahun. Hal ini berarti dalam setiap tahun produksi sertifikat berjumlah 888.889 buah dan rata-rata per bulan 74.074 buah.

Dengan melihat hasil diatas berarti terdapat peningkatan jumlah sertifikat yang dapat dibuat pada masa sebelum dan sesudah terbentuknya Badan Pertanahan Nasional. Peningkatan jumlah sertifikat tersebut sangat

sangat menentukan. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuannya. Bagaimanapun majunya teknologi berikut infrastrukturnya, ataupun besarnya struktur organisasi, namun jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian pula yang terjadi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Salatiga berjumlah 56 orang. Mereka menyebar masing-masing pada sub Bagian Tata Usaha, Seksi Hak-hak Atas Tanah, Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah, Seksi Penatagunaan Tanah serta Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi yang berjudul “Produktivitas Pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, secara ringkas permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi pegawai dalam mendukung tingkat produktivitas kerja di Kantor Pertanahan Kota Salatiga ?
2. Bagaimana produktivitas pegawai di bidang pelayanan tiap seksi sesuai tugas pokok dan fungsi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luas dan kompleksnya ruang lingkup dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan permasalahannya :

Target dan realitas produktivitas yang dicapai selama 3 tahun anggaran yaitu tahun 1997/1998 sampai dengan tahun 1999/2000 berdasarkan uraian tugas tiap seksi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kondisi pegawai dalam mendukung tingkat produktivitas kerja.
2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas pegawai tiap seksi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.

2. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk meningkatkan produktivitas pegawai di Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
2. Memberikan saran yang baik untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan didukung oleh kondisi pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga.
3. Dapat mengembangkan ilmu pertanahan dan penerapannya khususnya yang berkaitan dengan produktivitas pegawai.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Kondisi pegawai di Kantor Pertanahan Kota Salatiga sudah mendukung dalam meningkatkan produktivitas kerja.
2. Produktivitas pegawai Kantor Pertanahan Kota Salatiga dari masing-masing seksi selama 3 tahun anggaran yaitu :
 - Produktivitas Sub Bagian Tata Usaha adalah baik ditunjukkan dengan prosentase sebesar 102,76 %.
 - Produktivitas Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah adalah baik ditunjukkan dengan prosentase sebesar 100 %.
 - Produktivitas Seksi Penatagunaan Tanah adalah baik ditunjukkan dengan prosentase sebesar 98,69 %.
 - Produktivitas Seksi Hak Atas Tanah adalah baik ditunjukkan dengan prosentase sebesar 86,09 %.
 - Produktivitas Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah adalah baik ditunjukkan dengan prosentase sebesar 98,69 %.

B. Saran

1. Untuk mendukung dalam kelancaran tugas dalam hal peningkatan produktivitas kerja pegawai perlu adanya perbaikan gedung kantor disebabkan bangunan kantor sekarang merupakan bangunan bekas rumah tinggal.
2. Sarana dan prasarana yang ada perlu ditambah lagi yaitu adanya penambahan peralatan komputer, alat-alat dibidang pengukuran sehingga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agus Tulus, (1994), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gramedia, Jakarta.
2. BPN (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
3. Hidayat dan Socucherly, (1986), *Peningkatan Produktivitas Pemerintah dan Pegawai Negeri Kasus Indonesia*, Prisma 12, LP3ES, Jakarta.
4. Ka. BPN No. 1 Tahun 1989, *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN di Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten*.
5. Miftah Thoha, (1988), *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Rajawali, Jakarta.
6. Moekijat, (1986), *Tata Laksana Kantor*, Bandung.
7. Moekijat, (1989), *Administrasi Perkantoran*, Mandar Maju, Bandung.
8. Moekijat, (1981), *Latihan dan Pengembangan Pegawai*, Bandung.
9. Moh Nazir, (1985), *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
10. MPR, (1998), *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1998, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, Pabelan, Surakarta.
11. Nainggolan, (1989), *Pembinaan PNS*.
12. Siagian, Sondang P, (1987), *Patologi Birokrasi Analisis Identifikasi dan Terapinya*, Bina Aksara, Jakarta.
13. Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi Perkantoran*, Gajah Mada University Pers, Yogyakarta.
14. Suharsimi, Arikunto, (1992), *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta
15. Sinungan. Mechdasvah. (1977), *Produktivitas Apa dan Bagaimana*; Bumi